

**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2022**



**JALAN FIRDAUS NO 1 SINGKAWANG
TELP. (0562) 632455**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan hidayah dan karunia yang tak terhingga, sehingga penyusunan Revisi Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2022 dapat dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja OPD) ini disusun merupakan acuan perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2022. Di dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan yang dituangkan pada RKPD Kota Singkawang Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang tahun 2018 – 2022 .

Adapun penyusunan Rencana Kerja OPD ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD Kota Singkawang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel, serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Sekretaris DPRD Kota Singkawang

KARIM, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19641103 198510 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan hukum | 3 |
| 1.3. Maksud dan tujuan | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 4 |
| | |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU | |
| 2.1. Evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan capaian renstra OPD | 5 |
| 2.2. Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD | 17 |
| 2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Sekretariat DPRD | 18 |
| 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD | 19 |
| 2.5. Penelaahan usulan kegiatan..... | 27 |
| | |
| BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN | |
| 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional | 33 |
| 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD | 37 |
| 3.3. Program dan kegiatan | 44 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 51 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Singkawang sampai dengan Tahun 2020 | 9 |
| Tabel 2.2 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kota Singkawang | 21 |
| Tabel 2.3 | Usulan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2022 | 29 |
| Tabel 3.1 | Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan | 37 |
| Tabel 3.2 | Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022..... | 39 |
| Tabel 3.3 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023..... | 44 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap OPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD. Renstra-OPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran dari Renstra-OPD tersebut, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan aturan secara rinci untuk penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat

beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja OPD merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2022.
3. Rencana Kerja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2022 :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 (RKPD).
2. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Rencana Kerja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Undang - undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011.
10. Undang - undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Revisi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2022.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Revisi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2022, meliputi:

- BAB I Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.
- BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, review terhadap rancangan awal Sekretariat DPRD.
- BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD, program dan kegiatan dari Sekretariat DPRD Kota Singkawang.
- BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Revisi Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2021.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 dan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, yang selanjutnya ditegaskan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang, telah dirubah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD maka tugas, fungsi Sekretariat DPRD sebagai berikut : **“Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinir tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah.”**

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka **Tujuan** yang ingin dicapai dalam renstra Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2018 - 2022 adalah **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Bagi Peningkatan Kapasitas/Kinerja DPRD”**

Oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan dilingkup Pemerintah Kota Singkawang harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, **Sasaran** yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

“Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD”

Pencapaian kinerja serta sasaran tahun 2021 dituangkan dalam 2 (dua) Program 16 (enam belas) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - 10. Layanan Administrasi DPRD
- B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 - 1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - 2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 4. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 6. Fasilitasi Tugas DPRD

Adapun pencapaian target kinerja dari semua kegiatan dapat dilihat pada hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

Hasil Pengukurun Kinerja

| Sasaran strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|--|---|--------|-----------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD | Persentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. | 100% | 100% | 100 % |

Dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 Triwulan pertama belum ada yang memenuhi target kinerja seperti yang telah direncanakan.

- Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya:
 - Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD;
 - Lemahnya pemahaman terhadap tupoksi aparatur;
 - Pelaksanaan yang sangat hati-hati dan taat peraturan yang ada;
 - Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.
- Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja OPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional,diantaranya:
 - Tersedianya anggaran operasional yang cukup.
 - Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
 - Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
 - Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup.
 - Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Kebijakan-kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut:
 - Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak terkait dalam perencanaan kegiatan dan penganggarnya;
 - Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun OPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;
 - Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang baik dibidangnya;
 - Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;

**Tabel 2.1 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Desember
Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2020**

| No | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) | | Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2020) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2020 (%) | | Perangkat daerah penanggung jawab | |
|----------|--|---|--|-----------------------|--|----------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | K | Rp | K | Rp | I | | II | | III | | IV | | K | Rp | K | Rp | | |
| | | | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sekretariat DPRD | | | 58.445.713.645 | | 12.089.845.990 | 13,93 % | 1.681.888.635 | 28,08% | 868.717.069 | 48,16% | 2.160.572.249 | 39,13% | 3.823.272.955 | 81,69 % | 8.534.450.908 | 81,69% | 8.534.450.908 | | |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor | 95% | 16.515.065.840 | 100 % | 4.436.831.321 | 20,85 % | 925.641.845 | 34,11 % | 423.232.169 | 83,13% | 752.218.695 | 89,04% | 1.977.638.545 | 227,14% | 4.078.731.254 | 227,14% | 4.078.731.254 | Set-DPRD | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya kantor (listrik, air, telepon dan internet) | 48 % | 1.455.610.338 | 48 rekening pembayaran jasa | 253.023.576 | 13,56 % | 34.317.426 | 30,62 % | 43.156.516 | 55,16 % | 62.096.777 | 86,20 % | 48.369.233 | 185,54% | 187.939.952 | 88,47% | 187.939.952 | Set-DPRD | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Terpenuhinya pelunasan pajak dinas roda empat | 100% | 55.331.100 | 6 STNK mobil | 11.000.000 | 48,12 % | 5.293.225 | - | - | - | - | 82,45 % | 3.776.700 | 226,81% | 9.069.925 | 226,81% | 9.069.925 | Set-DPRD | |
| | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Tersedianya jasa/petugas pelayanan administrasi keuangan | 100% | 425.478.516 | 2 Bendahara,3 p.bendahara,1 pemegang barang, PPK,PPTK Panita penerima hasil pekerjaan dan operator | 84.920.000 | - | - | 42,17 % | 35.812.500 | 66,64 % | 20.775.000 | 85,56 % | 33.650.000 | 194,37% | 90.237.500 | 194,37% | 90.237.500 | Set-DPRD | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------|---------------|--|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|----------|---------------|---------|---------------|----------|
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Tersedianya jasa pelayanan kebersihan kantor dan bahan/barang pembersih | 90% | 180.521.486 | 34 Barang pembersih | 35.866.050 | - | - | 19,80 % | 7.099.800 | 36,44 % | 5.971.000 | 45,66 % | 16.508.500 | 146,23 % | 29.579.300 | 146,23% | 29.579.300 | Set-DPRD |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya alat tulis kantor | 90% | 372.431.622 | 62 item ATK | 74.040.800 | - | - | 22,41% | 16.914.300 | 42,07 % | 14.238.000 | 92,19 % | 37.102.850 | 157,10 % | 68.255.150 | 157,10% | 68.255.150 | Set-DPRD |
| | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Tersedianya keperluan barang cetakan dan penggandaan dokumen | 88% | 658.891.541 | 20 item cetak. 58000 copy , 350 jilid | 130.988.925 | - | - | 13,14% | 11.952.600 | 18,25 % | 4.656.000 | 94,83 % | 103.192.600 | 126,22 % | 119.801.200 | 126,22% | 119.801.200 | Set-DPRD |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya penerangan dan barang instalasi listrik kantor dan rumah jabatan Ketua DPRD | 92% | 116.390.981 | 135 buah lampu, 10 komponen listrik | 134.664.000 | - | - | 6,02% | 5.095.450 | 20,62 % | 12.365.000 | 92,11 % | 21.123.500 | 118,75 % | 38.583.950 | 118,75% | 38.583.950 | Set-DPRD |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | 90% | 1.068.326.557 | 3 item bahan/material, 1 item belanja jala ktr, 5 item belanja modal | 163.755.000 | 0,92 % | 1.500.000 | 32,51% | 43.610.000 | 35,08 % | 3.560.000 | 87,30 % | 165.082.300 | 155,81 % | 213.752.300 | 155,81% | 213.752.300 | Set-DPRD |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Barang Pecah belah | 0% | - | - | - | 0,00 % | - | 0,00% | - | 0,00 % | - | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - | Set-DPRD |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya media cetak, buku peraturan dan keperluan iklan di media massa | 100% | 422.930.808 | 5 koran, 1 majalah | 97.080.000 | 7,29 % | 7.075.000 | 27,44% | 26.635.000 | 31,76 % | 30.034.400 | 96,86 % | 30.290.000 | 163,35 % | 94.034.400 | 163,35% | 94.034.400 | Set-DPRD |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman | Tersedianya makanan dan minuman harian Anggota DPRD, Rapat Fraksi, Tamu dan rapat Sekretariat DPRD | 100% | 770.699.072 | 4020 porsi nasi lengkap, 4740 porsi snack | 277.650.000 | 0,00 % | - | 17,55% | 48.735.800 | 31,76 % | 39.436.100 | 68,98 % | 99.166.600 | 118,29 % | 187.338.500 | 118,29% | 187.338.500 | Set-DPRD |
| | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah (dalam dan luar provinsi) | 100% | 7.752.322.081 | 1 tahun | 2.482.225.226 | 32,42 % | 804.733.639 | 2,25% | 47.534.300 | 61,83 % | 455.300.515 | 97,09 % | 1.280.995.058 | 193,59 % | 2.588.563.512 | 193,59% | 2.588.563.512 | Set-DPRD |
| | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran | Tersedianya Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis di Sekretariat | 100% | 3.236.131.736 | 26 orang | 691.617.744 | 10,51 % | 72.722.555 | 19,76% | 136.685.903 | 45,28 % | 103.785.903 | 65,29 % | 138.381.204 | 140,84 % | 451.575.565 | 140,84% | 451.575.565 | Set-DPRD |

| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 20,85 % | 925.641 .845 | 34,11 % | 423. 232 169 | 83, 13% | 752. 218.69 5 | 89, 04% | 1.977.6 38.545 | 227,1 4% | 4.078.731. 254 | 227,14% | 4.078.731.25 4 | Set-DPRD | |
|-------------------------------|--|--|-------------|-----------------------|--|--------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|--|
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Prosentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik | 100% | 3.175.594. 200 | 100% | 304.972.155 | 0,28 % | 800. 000 | 13,92% | 25.016.0 00 | 18,0 2% | 7.606. 500 | 88, 32 % | 317.224 .540 | 120,5 2% | 350.647. 040 | 120,52% | 350.647. 040 | Set-DPRD | |
| | Pengadaan kendaraan Dinas Pimpinan | Tersedianya Kendaraan Dinas Pimpinan | 100% | - | 3 Mobil | - | - | - | - | - | - | - | 30,95 % | 681.000. 000 | 30,95 % | 681.000.000 | 30,95% | 681.000.000 | Set-DPRD | |
| | Pengadaan Mebeluer | Tersedianya Meja Kerja dan Kursi Kerja | 100% | 1.590.624.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,09 % | 192.930.000 | 97,09% | 192.930.000 | Set-DPRD | | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Terpenuhiya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 | 100% | 169.083.854 | Halaman dan kantor Set.DPRD | 36.855.780 | 2,17 % | 800.000 | 10,85% | 3.200.000 | 15,19 % | 1.600. 000 | 84,13 % | 33.406. 300 | 98,23 % | 39.006.300 | 98,23% | 39.006.300 | Set-DPRD | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasio nal | Terpenuhiya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 | 100% | 356.677.424 | 3 unit mobil | 68.000.000 | - | - | 18,87% | 8.775.000 | - | - | 53,56 % | 24.906. 740 | 72,43 % | 33.681.740 | 72,43% | 33.681.740 | Set-DPRD | |
| | Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor | Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor | 100% | 129.832.763 | 47 AC, telepon, fax, receiver digital,dispencer,mesin genset,lemari es,filng kabinet,handy cam,sound system, kulkas, tiang umbul-umbul | 27.948.375 | - | - | - | - | 19,70 % | 5.505. 500 | 76,85 % | 21.479. 400 | 96,55 % | 26.984.900 | 96,55% | 26.984.900 | Set-DPRD | |
| | Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor | Tersedianya sarana kerja komputer yang berfungsi dengan baik | 100% | 117.592.120 | Tabung gas, 22 unit PC, 14 unit laptop | 25.108.000 | - | - | 3,32% | 501.000 | 6,63 % | 501. 000 | 63,37 % | 15.911. 100 | 67,36 % | 16.913.100 | 67,36% | 16.913.100 | Set-DPRD | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|--|
| | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | Terpenuhiya pemeliharaan mebelair kantor | 96% | 20.742.512 | 148 unit meja, 59 unit pintu | 4.050.000 | - | - | - | - | - | - | 60,15 % | 2.436.000 | 60,15 % | 2.436.000 | 60,15 % | 2.436.000 | Set-DPRD | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Terpenuhiya pemeliharaan mobil jabatan Pimpinan DPRD | 90% | 791.041.327 | 3 unit mobil | 143.000.000 | - | - | 22,80% | 12.540.000 | - | - | 47,55 % | 26.155.000 | 70,35 % | 38.695.000 | 70,35% | 38.695.000 | Set-DPRD | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 0,28 % | 800.000 | 13,92% | 25.016.000 | 18,02% | 7.606.500 | 88,32 % | 317.224.540 | 120,52% | 350.647.040 | 120,52% | 350.647.040 | Set-DPRD | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Prosentase Aparatur Mem peroleh Fasilitas Kelengkapan Dinas | 100% | 1.928.190.000 | 100% | 609.790.000 | - | - | 16,85% | 46.500.000 | 77,93% | 168.600.000 | - | - | 99,58% | 215.100.000 | 99,58% | 215.100.000 | Set-DPRD | |
| | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya keperluan pakaian dinas Anggota DPRD | 100% | 1.928.190.000 | 180 stel | 318.000.000 | - | - | 16,85% | 46.500.000 | 77,93% | 168.600.000 | - | - | 99,58% | 215.100.000 | 99,58% | 215.100.000 | Set-DPRD | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | 16,85% | 46.500.000 | 77,93% | 168.600.000 | - | - | 99,58% | 215.100.000 | 99,58% | 215.100.000 | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Prosentase Aparatur Mem peroleh Kesempatan Meningkatkan Kapasitas | 100% | 1.516.445.000 | 100% | 297.285.000 | - | - | 30,13% | 51.606.000 | - | - | - | - | 96,27% | 51.606.000 | 96,27% | 51.606.000 | Set-DPRD | |
| | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah bimtek yang diikuti | 100% | 1.516.445.000 | 6 kali keg | 303.260.000 | - | - | 30,13% | 51.606.000 | - | - | - | - | 96,27% | 51.606.000 | 96,27% | 51.606.000 | Set-DPRD | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | - | - | 30,13% | 51.606.000 | | | | | 96,27% | 51.606.000 | 96,27% | 51.606.000 | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 5 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Prosentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan OPD yang Tersusun | 100% | 134.244.826 | 100% | 39.907.800 | 16,61 % | 6.830.000 | 48,75% | 12.823.400 | 49,58% | 810.800 | 61,56% | 34.757.600 | 97,43% | 55.021.800 | 97,43% | 55.021.800 | Set-DPRD |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | Jumlah dokumen perjanjian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD | 100% | 13.335.928 | 1 dok laporan | 5.901.350 | - | - | 56,62 | 3.341.900 | - | - | - | - | 83,00% | 18.245.000 | 83,00% | 18.245.000 | Set-DPRD |
| | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Data keuangan akhir tahun | 100% | 73.715.028 | 1 dok laporan | 21.83.100 | 26,8% | 5.870.000 | 31,31% | 984.800 | 32,80% | 810.800 | 65,90% | 15.272.100 | 98,97% | 22.937.700 | 98,97% | 22.937.700 | Set-DPRD |
| | Penyusunan Lakip OPD | Jumlah dokumen Lakip OPD | 100% | 19.947.693 | 1 dok laporan | 5.692.600 | - | - | 73,11% | 4.161.700 | - | - | 8,01% | 380.000 | 95,76% | 4.541.700 | 95,76% | 4.541.700 | Set-DPRD |
| | Penyusunan Renstra OPD | Data Renstra OPD Set-DPRD 2018 - 2022 | 100% | 5.669.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set-DPRD |
| | Penyusunan LPPD / LKPJ | Dokumen renstra LPPD/LKPJ OPD | 100% | 21.576.527 | 1 dok laporan | 5.419.600 | 11,84% | 760.000 | 79,37% | 4.335.000 | - | - | 13,09% | 860.000 | 90,64% | 5.955.000 | 90,64% | 5.955.000 | Set-DPRD |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 16,61 % | 6.830.000 | 48,75% | 12.823.400 | 49,58% | 810.800 | 61,56% | 34.757.600 | 97,43% | 55.021.800 | 97,43% | 55.021.800 | Set-DPRD |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | PROGRAM PENGUATAN TRANSPARANSI / PUBLIK | Prosentase Keikutsertaan Aparatur Set-DPRD dalam Event Daerah | 100% | 109.800.000 | 100% | 24.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set-DPRD |
| | Expo kinerja OPD | Jumlah masyarakat yang mengunjungi stand OPD Sekretariat DPRD Kota Singkawang | 100% | 109.800.000 | 150 orang | 23.600.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set-DPRD |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 7 | PROGRAM Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Prosentase Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Ditindaklanjuti | 100% | 33.579.364.205 | 100% | 6.421.834.314 | 11,66% | 748.816.790 | 20,60% | 299.012.300 | 44,48% | 1.214.841.854 | 28,41% | 1.433.782.720 | 73,24% | 3.696.433.664 | 73,24% | 3.696.433.664 | Set-DPRD |
| | Pembahasan rancangan peraturan daerah | Jumlah Raperda yang disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda | 90% | 12.094.321.205 | 12 Perda | 2.390.009.314 | - | - | 9,47% | 202.560.200 | 57,08% | 1.018.852.254 | 20,06% | 579.820.670 | 62,33% | 1.801.253.054 | 62,33% | 1.801.253.054 | Set-DPRD |
| | Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ Agama | Terselenggaranya dialog/pertemuan dengan pejabat eksekutif, tokoh agama dan masyarakat | 90% | 198.262.000 | 100% | 40.373.000 | 22,11% | 8.925.000 | 26,32% | 1.700.000 | 30,53% | 1.700.000 | 32,32% | 13.047.500 | 62,85% | 25.372.500 | 62,85% | 25.372.500 | Set-DPRD |
| | Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan | Jumlah rapat Alat Kelengkapan Dewan | 90% | 305.518.500 | 40 dokumen | 61.903.700 | - | - | 30,73% | 19.022.500 | 33,99% | 2.021.100 | 16,25% | 10.061.600 | 50,25% | 31.105.200 | 50,25% | 31.105.200 | Set-DPRD |
| | Rapat-rapat paripurna | Jumlah Sidang Paripurna yang dilaksanakan | 90% | 491.230.250 | 10 kali | 181.263.000 | - | - | 5,69% | 6.785.500 | - | - | 31,60% | 7.069.000 | 61,94% | 13.854.500 | 61,94% | 13.854.500 | Set-DPRD |
| | Kegiatan Reses | Terselenggaranya audiensi Anggota DPRD dengan masing-masing konsituennya | 100% | 4.590.737.250 | 18000 konstituen, 3 keg | 605.156.300 | 30,20% | 182.768.500 | 30,22% | 135.000 | 62,00% | 192.268.500 | 31,72% | 191.949.300 | 93,71% | 567.121.300 | 93,71% | 567.121.300 | Set-DPRD |
| | Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | Jumlah peserta yang mengikuti | 100% | 8.559.920.000 | 30 orang, 3 kali | 1.511.414.000 | 19,11% | 288.773.600 | 26,16% | 10.587.400 | - | - | 37,38% | 269.116.615 | 78,97% | 568.477.615 | 78,97% | 568.477.615 | Set-DPRD |
| | Pelayanan pengaduan masyarakat | Jumlah pelayanan pengaduan masyarakat | 80% | 76.375.000 | 7 keg | 15.715.000 | - | - | - | - | - | - | 77,62% | 12.197.500 | 77,62% | 12.197.500 | 77,62% | 12.197.500 | Set-DPRD |
| | Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar Daerah | Pembelajaran tentang pengembangan daerah melalui kunjungan kerja ke | 100% | 5.981.000.000 | 3 set dok | 1.397.000.000 | 19,21% | 268.349.690 | 35,06% | 58.201.700 | - | - | 50,63% | 334.945.605 | 100% | 661.496.995 | 100% | 661.496.995 | Set-DPRD |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | luar provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelayanan Kegiatan Anggota DPRD | Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kegiatan DPRD | 80% | 941.000.000 | Tenaga ahli | 189.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set-DPRD | |
| | General check up Anggota DPRD | Medical check up Anggota DPRD Kota Singkawang | 100% | 341.000.000 | 1 set dokumen laporan | 30.000.000 | - | - | - | - | - | 51,85 % | 15.555.000 | 51,85 % | 15.555.000 | 51,85% | 15.555.000 | 15.555.000 | 15.555.000 | Set-DPRD | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | 11,66 % | 748.816 .790 | 20,60% | 299.012.300 | 44,48% | 1.214.841.854 | 28,41% | 1.433.782.720 | 73,24 % | 3.696.433.664 | 73,24% | 3.696.433.664 | 3.696.433.664 | 3.696.433.664 | Set-DPRD |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | Prosentase Keikutsertaan SDM Aparatur Dalam Event Daerah | 100% | 1.100.000.000 | 100% | 200.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set-DPRD | |
| | Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah | Jumlah peserta yang mengikuti | 100% | 1.100.000.000 | 100% | 145.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set-DPRD | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | PROGRAM Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah | Prosentase keikutsertaan SDM Aparatur dalam Event Daerah | 100% | 46.830.000 | 100% | 9.360.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set-DPRD | |
| | Rakernas APEKSI dan Raker KOMWIL V APEKSI sekalimantan | Jumlah peserta yang mengikuti Rakernas APeksi | 100% | 46.830.000 | 100% | 9.360.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Set-DPRD | |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------|--------------------|-------------|-------------------|---|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 10 | PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN ORGANISASI | Prosentase adanya Evaluasi Terhadap Jabatan di OPD | 100% | 33.802.400 | 100% | 4.552.400 | - | - | - | - | - | - | 70,28% | 4.734.150 | 70,28% | 4.734.150 | 70,28% | 4.734.150 | Set-DPRD |
| | Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang | Jumlah dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja | 100% | 33.802.400 | 32 dokumen | 6.376.300 | - | - | - | - | - | - | 70,28% | 4.734.150 | 70,28% | 4.734.150 | 70,28% | 4.734.150 | Set-DPRD |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | - | - | - | - | - | - | 70,28% | 4.734.150 | 70,28% | 4.734.150 | 70,28% | 4.734.150 | Set-DPRD |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBA NGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Prosentase Pengelolaan Keuangan Daerah | 100% | 248.255.874 | 100% | 48.729.900 | - | - | 21.60% | 10.527.200 | 46,28% | 12.022.800 | 58,57% | 42.473.100 | 89,66% | 65.023.100 | 89,66% | 65.023.100 | Set-DPRD |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah dokumen laporan barang | 100% | 20.814.815 | 1 buku | 4.158.900 | - | - | 74,54% | 3.100.000 | - | - | - | - | 50,42% | 3.100.000 | - | - | Set-DPRD |
| | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah verifikasi data administrasi dan fisik aset di Sekretariat DPRD | 100% | 20.763.235 | 1 laporan | 4.116.800 | - | - | 51,25% | 2.110.000 | - | - | - | - | 34,43% | 2.110.000 | 34,43% | 2.110.000 | Set-DPRD |
| | Penyusunan Dokumen Penganggaran OPD | RKA, DPA dan DPPA DPRD dan Sekretariat DPRD | 100% | 115.906.594 | 6 dokumen | 22.497.700 | - | - | - | - | 50,92% | 11.456.400 | 65,40% | 21.792.300 | 99,79% | 33.248.700 | 99,79% | 33.248.700 | Set-DPRD |
| | Pengendalian Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) | Laporan realisasi SPM perbagian | 100% | 90.771.231 | 250 SPM | 17.956.500 | - | - | 29,61% | 5.317.200 | 32,77% | 566.400 | 76,81% | 20.680.800 | 98,67% | 26.564.400 | 98,67% | 26.564.400 | Set-DPRD |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | - | - | 21.60% | 10.527.200 | 46,28% | 12.022.800 | 58,57% | 42.473.100 | 89,66% | 65.023.100 | 89,66% | 65.023.100 | Set-DPRD |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|------|------------|------------|------------|---|---|---|---|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|----------|
| 12 | PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN | Prosentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan | 100% | 58.121.300 | 100% | 10.917.700 | - | - | - | - | 38,50% | 4.471.600 | 73,40% | 12.682.300 | 99,28% | 17.153.900 | 99,28% | 17.153.900 | Set-DPRD |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan | Dokumen SPJ administrasi dan fungsional DPRD dan Sekretariat DPRD, Rekonsiliasi LRA DPRD dan Sekretariat DPRD dengan bidang pembukuan BKD | 100% | 58.121.300 | 48 dokumen | 11.614.400 | - | - | - | - | 38,50% | 4.471.600 | 73,40% | 12.682.300 | 99,28% | 17.153.900 | 99,28% | 17.153.900 | Set-DPRD |
| Rata-rata capaian kinerja (%) | | | | | | | - | - | - | - | 38,50% | 4.471.600 | 73,40% | 12.682.300 | 99,28% | 17.153.900 | 99,28% | 17.153.900 | Set-DPRD |
| Prediket Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas pokok "Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. "Untuk menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

1. Penyelenggara Administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggara Administrasi Keuangan DPRD;
3. Penyelenggara Rapat – Rapat DPRD;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Sekretariat DPRD secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
14. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan

15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottom-up*) maupun dari tingkat atas (*top-down*), sehingga peran serta masyarakat (*stakeholders*) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2022, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2019 dari target/sasaran sebesar 100% rata-rata selama 1 (satu) tahun anggaran dan dengan target Triwulan 1 (pertama) 7,03 % yang artinya pelaksanaan kegiatan masih belum sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, belum terealisasi antara bulan Januari sampai dengan Maret 2019.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2019 (Januari dan Maret) sehingga penyerapan kinerja masih rendah adalah:

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari bagian masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi

dan/atau pengambilan keputusan.

3. Perubahan peraturan perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan system pelayanan dan fasilitasi kedewanan.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya **dampak** terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 2018–2022, yaitu :

Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 terutama di bulan Januari dan Maret.

Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan bertindak dan juga dedikasi aparatur Sekretariat DPRD Kota Singkawang yang ditandai dengan kurang disiplin sehingga mengurangi dalam proses pencapaian visi dan misi yang ada di dalam RPJMD meskipun masih berjalan tiga bulan Januari dan Maret 2019. Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Singkawang antara lain :

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD
- d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- e. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- f. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun lembaga.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2021, memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal

itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2022 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembangunan didaerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
tahun 2022 Kota Singkawang

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | |
|----------|---|-----------------|--|------------------------------|-----------------------|---|-----------------|--|------------------------------|----------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | 35.187.158.295 | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Set-DPRD | Prosentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 27.809.701.668 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Set-DPRD | Prosentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | |
| | PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 46.081.843 | PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Set-DPRD | Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 2 dokumen | 9.261.560 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Set-DPRD | Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 2 dokumen | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Set-DPRD | Data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, LAKIP, LPPD OPD | 3 dokumen | 16.820.283 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Set-DPRD | Data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, LAKIP, LPPD OPD | 3 dokumen | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 4 dokumen | 20.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 4 dokumen | |
| | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun | 100% | 21.019.030.763 | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun | 100% | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Set-DPRD | Jumlah Anggota DPRD, Jumlah ASN, Jumlah THL | 30 orang, 29 orang, 22 orang | 20.664.976.163 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Set-DPRD | Jumlah Anggota DPRD, Jumlah ASN, Jumlah THL | 30 orang, 29 orang, 22 orang | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Set-DPRD | Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan | 100% | 191.640.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Set-DPRD | Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan | 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---|--------------------|--------------------|---|----------|---|--------------------|--|
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIPKD | Set-DPRD | Cakupan bahan pelaksanaan verifikasi | 2 laporan, 250 SPM | 42.000.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIPKD | Set-DPRD | Cakupan bahan pelaksanaan verifikasi | 2 laporan, 250 SPM | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD | Set-DPRD | Jumlah dokumen akutansi dan pelaporan keuangan | 48 dokumen | 31.000.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD | Set-DPRD | Jumlah dokumen akutansi dan pelaporan keuangan | 48 dokumen | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD | Set-DPRD | Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun, Penyediaan Tanggapan | 1 dokumen | 40.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD | Set-DPRD | Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun, Penyediaan Tanggapan | 1 dokumen | |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan | 2 dokumen | 26.916.600 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan | 2 dokumen | |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Set-DPRD | Jumlah dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 6 dokumen | 22.497.700 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Set-DPRD | Jumlah dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 6 dokumen | |
| | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor | 100% | 50.545.200 | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor | 100% | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Set-DPRD | Cakupan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 2 laporan | 50.545.200 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Set-DPRD | Cakupan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 2 laporan | |
| | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase aparaturnya memperoleh fasilitas kelengkapan dinas | 100% | 126.788.000 | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase aparaturnya memperoleh fasilitas kelengkapan dinas | 100% | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Set-DPRD | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | 140 stel | 46.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Set-DPRD | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | 140 stel | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Set-DPRD | Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan | 180 orang | 80.788.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Set-DPRD | Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan | 180 orang | |
| | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor | 100% | 544.559.441 | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor | 100% | |
| | Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Set-DPRD | Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 100% | 37.614.313 | Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Set-DPRD | Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---------------------------------------|----------------------|--|----------|---|---------------------------------------|--|
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Set-DPRD | Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 belanja jasa, 3 item bahan/material | 131.646.600 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Set-DPRD | Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 belanja jasa, 3 item bahan/material | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Set-DPRD | Cakupan peralatan rumah tangga yang disediakan | - | 67.890.200 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Set-DPRD | Cakupan peralatan rumah tangga yang disediakan | - | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Set-DPRD | Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 350 jilid, 58.000 copy, 20 item cetak | 74.368.328 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Set-DPRD | Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 350 jilid, 58.000 copy, 20 item cetak | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan | Set-DPRD | Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 majalah dan iklan, 5 koran | 83.040.000 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan | Set-DPRD | Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 majalah dan iklan, 5 koran | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Set-DPRD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 150.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Set-DPRD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | |
| | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Set-DPRD | Presentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah | | 3.625.545.800 | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Set-DPRD | Presentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah | | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Set-DPRD | Jumlah mobil jabatan yang diadakan | - | 1.200.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Set-DPRD | Jumlah mobil jabatan yang diadakan | - | |
| | Pengadaan Mebel | Set-DPRD | Jumlah Mebeleur yang diadakan | - | 1.394.064.200 | Pengadaan Mebel | Set-DPRD | Jumlah Mebeleur yang diadakan | - | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Set-DPRD | Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | 1.031.481.600 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Set-DPRD | Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | |
| | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Set-DPRD | Prosentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 1.650.173.180 | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Set-DPRD | Prosentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Set-DPRD | Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 48 rekening | 330.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Set-DPRD | Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 48 rekening | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Set-DPRD | Alat Tulis Kantor Jasa Kebersihan Kantor Makanan dan Minuman yang tersedia | 100% | 1.320.173.180 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Set-DPRD | Alat Tulis Kantor Jasa Kebersihan Kantor Makanan dan Minuman yang tersedia | 100% | |

| | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Set-DPRD | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 265.678.156 | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Set-DPRD | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | |
|--|--|-----------------|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|---|-----------------|--|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Set-DPRD | Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional yang disediakan | 6 STNK, 84 kali | 101.830.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Set-DPRD | Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional yang disediakan | 6 STNK, 84 kali | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Set-DPRD | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan | - | 50.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Set-DPRD | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan | - | |
| | Pemeliharaan Mebel | Set-DPRD | Jumlah Mebeleur yang dipelihara | - | 15.000.000 | Pemeliharaan Mebel | Set-DPRD | Jumlah Mebeleur yang dipelihara | - | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Set-DPRD | Cakupan Rumah Jabatan dan Kantor yang dipelihara | 100% | 40.504.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Set-DPRD | Cakupan Rumah Jabatan dan Kantor yang dipelihara | 100% | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Set-DPRD | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 126 unit | 58.344.156 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Set-DPRD | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 126 unit | |
| | LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD | Set-DPRD | Presentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100% | 423.000.000 | LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD | Set-DPRD | Presentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100% | |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Pelaporan LHKPN melalui e-LHKPN dan SPT Tahun melalui DJP Online Pimpinan dan Anggota DPRD | 60 dokumen | 15.000.000 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Pelaporan LHKPN melalui e-LHKPN dan SPT Tahun melalui DJP Online Pimpinan dan Anggota DPRD | 60 dokumen | |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Set-DPRD | Jumlah pakaian dinas beserta atributnya | 120 stel | 378.000.000 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Set-DPRD | Jumlah pakaian dinas beserta atributnya | 120 stel | |
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Set-DPRD | General check up yang terlayani bagi Anggota DPRD | 30 orang | 30.000.000 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Set-DPRD | General check up yang terlayani bagi Anggota DPRD | 30 orang | |
| | LAYANAN ADMINISTRASI DPRD | Set-DPRD | Presentase Terpenuhinya Layanan Adminstrasi DPRD | 100% | 122.903.700 | LAYANAN ADMINISTRASI DPRD | Set-DPRD | Presentase Terpenuhinya Layanan Adminstrasi DPRD | 100% | |
| | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Set-DPRD | Jumlah rapat alat kelengkapan dewan, rapat paripurna yang terlaksana | 52 dokumen | 58.299.285 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Set-DPRD | Jumlah rapat alat kelengkapan dewan, rapat paripurna yang terlaksana | 52 dokumen | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|--|-----------|---------------|--|----------|--|-----------|--|
| 2 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Set-DPRD | Presentase Fasilitas Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD | 100% | 7.377.456.627 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Set-DPRD | Presentase Fasilitas Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD | 100% | |
| | PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD | Set-DPRD | Presentase Fasilitas Pembentukan Perda dan Peraturan Daerah | 100% | 1.460.052.831 | PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD | Set-DPRD | Presentase Fasilitas Pembentukan Perda dan Peraturan Daerah | 100% | |
| | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Propemperda | 1 dokumen | 85.415.000 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Propemperda | 1 dokumen | |
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Set-DPRD | Jumlah raperda yang akan ditetapkan menjadi perda/Peraturan DPRD | 8 perda | 1.028.135.973 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Set-DPRD | Jumlah raperda yang akan ditetapkan menjadi perda/Peraturan DPRD | 8 perda | |
| | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Set-DPRD | Jumlah perda/peraturan kepala daerah yang dikaji terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru | - | 46.501.858 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Set-DPRD | Jumlah perda/peraturan kepala daerah yang dikaji terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru | - | |
| | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Naskah dan Raperda | 3 dokumen | 300.000.000 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Naskah dan Raperda | 3 dokumen | |
| | PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN | Set-DPRD | Presentase Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100% | 1.178.948.198 | PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN | Set-DPRD | Presentase Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100% | |
| | Pembahasan KUA dan PPAS | Set-DPRD | Dokumen KUA dan PPAS | 2 dokumen | 108.160.920 | Pembahasan KUA dan PPAS | Set-DPRD | Dokumen KUA dan PPAS | 2 dokumen | |
| | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Set-DPRD | Dokumen KUPA dan PPAS | 2 dokumen | 137.822.122 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Set-DPRD | Dokumen KUPA dan PPAS | 2 dokumen | |
| | Pembahasan APBD | Set-DPRD | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | 137.822.122 | Pembahasan APBD | Set-DPRD | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | |
| | Pembahasan APBD Perubahan | Set-DPRD | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | 397.928.722 | Pembahasan APBD Perubahan | Set-DPRD | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | |
| | Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD | Set-DPRD | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | 397.214.312 | Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD | Set-DPRD | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | |
| | PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Set-DPRD | Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100% | 309.967.950 | PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Set-DPRD | Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100% | |
| | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Set-DPRD | 1 dokumen LKPJ | 1 dokumen | 309.967.950 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Set-DPRD | 1 dokumen LKPJ | 1 dokumen | |

| | PENINGKATAN KAPASITAS DPRD | Set-DPRD | Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 100% | 1.357.839.470 | PENINGKATAN KAPASITAS DPRD | Set-DPRD | Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 100% | |
|--|--|-----------------|---|-------------|----------------------|--|-----------------|---|-------------|--|
| | Bimbingan Teknis DPRD | Set-DPRD | Jumlah Bimtek/Sosialisasi yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD | 6 kali | 1.121.676.000 | Bimbingan Teknis DPRD | Set-DPRD | Jumlah Bimtek/Sosialisasi yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD | 6 kali | |
| | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Set-DPRD | Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan yang terlayani | - | 100.000.000 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Set-DPRD | Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan yang terlayani | - | |
| | Penyediaan tenaga ahli fraksi | Set-DPRD | Jumlah tenaga ahli fraksi | 7 orang | 94.500.000 | Penyediaan tenaga ahli fraksi | Set-DPRD | Jumlah tenaga ahli fraksi | 7 orang | |
| | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Set-DPRD | Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani, Jumlah dialog dengan masyarakat serta pejabat pemerintah yang dilaksanakan DPRD | 10 kali | 28.821.230 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Set-DPRD | Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani, Jumlah dialog dengan masyarakat serta pejabat pemerintah yang dilaksanakan DPRD | 10 kali | |
| | Penyusunan Program Kerja DPRD | Set-DPRD | Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 dokumen | 12.842.240 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Set-DPRD | Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 dokumen | |
| | PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT | Set-DPRD | Presentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100% | 718.793.178 | PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT | Set-DPRD | Presentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100% | |
| | Pelaksanaan Reses | Set-DPRD | Jumlah pertemuan antara anggota DPRD dengan konstituennya | 3 kali | 718.793.178 | Pelaksanaan Reses | Set-DPRD | Jumlah pertemuan antara anggota DPRD dengan konstituennya | 3 kali | |
| | FASILITASI TUGAS DPRD | Set-DPRD | Presentase Fasilitasi Tugas DPRD | 100% | 2.351.855.000 | FASILITASI TUGAS DPRD | Set-DPRD | Presentase Fasilitasi Tugas DPRD | 100% | |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Set-DPRD | Cakupan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD baik Dalam dan Luar Daerah | 1 tahun | 2.351.855.000 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Set-DPRD | Cakupan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD baik Dalam dan Luar Daerah | 1 tahun | |

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka OPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses *bottom-up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan Musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum OPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum OPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing OPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil Musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan Musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja OPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum OPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas

dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum OPD dan juga berpedoman pada RKPD Kota Singkawang Tahun 2021, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kota Singkawang tahun 2022.

| No | Program dan Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----------|---|----------|---|------------------------------------|-----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | SEKRETARIAT DPRD | | | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Set-DPRD | Prosentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | | |
| | PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Set-DPRD | Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 2 dokumen | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Set-DPRD | Data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, LAKIP, LPPD OPD | 3 dokumen | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 4 dokumen | | |
| | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun | 100% | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Set-DPRD | Jumlah Anggota DPRD, Jumlah ASN, Jumlah THL | 30 orang, 29 orang, 22 orang | | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Set-DPRD | Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan | 100% | | |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIPKD | Set-DPRD | Cakupan bahan pelaksanaan verifikasi | 2 laporan, 250 SPM | | |
| | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD | Set-DPRD | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan | 48 dokumen | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD | Set-DPRD | Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir Tahun, Penyediaan Tanggapan | 1 dokumen | | |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan | 2 dokumen | | |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Set-DPRD | Jumlah dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 6 dokumen | | |
| | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor | 100% | | |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Set-DPRD | Cakupan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 2 laporan | | |
| | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas | 100% | | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Set-DPRD | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | 140 stel | | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Set-DPRD | Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan | 180 orang | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------|---|---------------------------------------|--|--|
| | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Set-DPRD | Presentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor | 100% | | |
| | Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Set-DPRD | Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 100% | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Set-DPRD | Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 belanja jasa, 3 item bahan/material | | |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Set-DPRD | Cakupan peralatan rumah tangga yang disediakan | - | | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Set-DPRD | Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 350 jilid, 58.000 copy, 20 item cetak | | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan | Set-DPRD | Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 majalah dan iklan, 5 koran | | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Set-DPRD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | | |
| | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Set-DPRD | Presentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah | | | |
| | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Set-DPRD | Jumlah mobil jabatan yang diadakan | - | | |
| | Pengadaan Mebel | Set-DPRD | Jumlah Mebeleur yang diadakan | - | | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Set-DPRD | Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | | |
| | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Set-DPRD | Presentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Set-DPRD | Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 48 rekening | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Set-DPRD | Alat Tulis Kantor Jasa Kebersihan Kantor Makanan dan Minuman yang tersedia | 100% | | |
| | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Set-DPRD | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Set-DPRD | Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional yang disediakan | 6 STNK, 84 kali | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|---|-------------|--|--|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Set-DPRD | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan | - | | |
| | Pemeliharaan Mebel | Set-DPRD | Jumlah Mebeleur yang dipelihara | - | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Set-DPRD | Cakupan Rumah Jabatan dan Kantor yang dipelihara | 100% | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Set-DPRD | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 126 unit | | |
| | LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD | Set-DPRD | Presentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100% | | |
| | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Pelaporan LHKPN melalui e-LHKPN dan SPT Tahun melalui DJP Online Pimpinan dan Anggota DPRD | 60 dokumen | | |
| | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Set-DPRD | Jumlah pakaian dinas beserta atributnya | 120 stel | | |
| | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Set-DPRD | General check up yang terlayani bagi Anggota DPRD | 30 orang | | |
| | LAYANAN ADMINISTRASI DPRD | Set-DPRD | Presentase Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD | 100% | | |
| | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Set-DPRD | Jumlah rapat alat kelengkapan dewan, rapat paripurna yang terlaksana | 52 dokumen | | |
| II | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Set-DPRD | Presentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD | 100% | | |
| | PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD | Set-DPRD | Presentase Fasilitasi Pembentukan Perda dan Peraturan Daerah | 100% | | |
| | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Propemperda | 1 dokumen | | |
| | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Set-DPRD | Jumlah raperda yang akan ditetapkan menjadi perda/Peraturan DPRD | 8 perda | | |
| | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Set-DPRD | Jumlah perda/peraturan kepala daerah yang dikaji terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru | - | | |
| | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Set-DPRD | Jumlah Dokumen Naskah dan Raperda | 3 dokumen | | |
| | PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN | Set-DPRD | Presentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100% | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|-------------|--|--|
| | Pembahasan KUA dan PPAS | Set-DPRD | Dokumen KUA dan PPAS | 2 dokumen | | |
| | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Set-DPRD | Dokumen KUPA dan PPAS | 2 dokumen | | |
| | Pembahasan APBD | Set-DPRD | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | | |
| | Pembahasan APBD Perubahan | Set-DPRD | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | | |
| | Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD | Set-DPRD | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | | |
| | PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Set-DPRD | Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100% | | |
| | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Set-DPRD | 1 dokumen LKPJ | 1 dokumen | | |
| | PENINGKATAN KAPASITAS DPRD | Set-DPRD | Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 100% | | |
| | Bimbingan Teknis DPRD | Set-DPRD | Jumlah Bimtek/Sosialisasi yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD | 6 kali | | |
| | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Set-DPRD | Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan yang terlayani | - | | |
| | Penyediaan tenaga ahli fraksi | Set-DPRD | Jumlah tenaga ahli fraksi | 7 orang | | |
| | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Set-DPRD | Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani, jumlah dialog dengan masyarakat serta pejabat pemerintah yang dilaksanakan DPRD | 10 kali | | |
| | Penyusunan Program Kerja DPRD | Set-DPRD | Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 dokumen | | |
| | PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT | Set-DPRD | Presentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100% | | |
| | Pelaksanaan Reses | Set-DPRD | Jumlah pertemuan antara anggota DPRD dengan konstituennya | 3 kali | | |
| | FASILITASI TUGAS DPRD | Set-DPRD | Presentase Fasilitasi Tugas DPRD | 100% | | |
| | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Set-DPRD | Cakupan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD baik Dalam dan Luar Daerah | 1 tahun | | |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumberdaya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum di dalam visi RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, dengan 8 Misi yaitu :**

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. **Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;** meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mereformasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;** Dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat

kecil.

4. **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani dikawasan regional dan internasional;** memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen Negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;** dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
7. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** Dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas

sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran. Dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** ; dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerjasama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok,serta antar lembaga diberbagai bidang.

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan:

- (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tatakelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi;
- (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan;
- (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi,tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia,pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015- 2019, Pemerintah Kota Singkawang dalam RPJMD Tahun 2018 – 2022 telah menetapkan Visi,Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah menetapkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pembangunan Kota Singkawang adalah : **“SINGKAWANG HEBAT 2022”**

Untuk mewujudkan visi Pembangunan tersebut kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan menetapkan 7 (tujuh) Misi Kota Singkawang Tahun 2018 – 2022 sebagai berikut:

1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam keberagaman agama, etnis dan budaya.
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang handal, kreatif dan

mandiri.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas.
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan.
7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur fasilitasi/pelayanan kepada DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut, maka dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 merupakan salah satu OPD pelaksana Misi ke 4 (empat) yaitu : **“Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi”**

dengan tujuan RPJMD **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapabilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi”** dansasaran **“Terwujudnya pelayanan publik yang prima, transparan dan akuntabel berbasis teknologi komunikasi dan informasi”**.

Dari Rumusan di atas maka Sekretariat DPRD Kota Singkawang pada Rencana strategis Tahun 2018 - 2022 Menetapkan tujuan **“Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD bagi peningkatan kapasitas / kinerja DPRD”**.

Sekretariat DPRD dengan tujuan tersebut diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang dalam Melaksanakan **Trifungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan**. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah sangat dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah dalam proses Penetapan produk hukum yang berkaulitas dan partisipatif yang mampu mangakomodir kepentingan masyarakat.

Dari uraian diatas dalam mendukung tercapainya kebijakan tersebut kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta

Sekretariat DPRD sebagai berikut:

Tugas utama : Meningkatnya kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Dalam menunjang meningkatnya kinerja DPRD sangat dibutuhkan faktor pendukung sarana dan prasarana yang memadai serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang trampil, akuntabel dan profesional sehingga tugas dan fungsi fasilitasi terhadap pelaksanaan 3 fungsi Anggota DPRD yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal.

**Tabel 3.1.
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan**

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/ | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN |
|-----------|--|--|---|
| 1 | Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD | Persentase kepuasan DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD | Jumlah DPRD yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD/ jumlah seluruh anggota DPRD x 100% |

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD

- **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akandicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi **SINGKAWANG HEBAT 2022** dan misi yang ke 4 (empat) **MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TEGAS, AMANAH DAN EFEKTIF YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA BERBASIS TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI.**

Sekretariat DPRD termasuk sebagai OPD yang memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi, misi tersebut. Dalam menunjang terwujudnya visi dan misi tersebut Sekretariat DPRD Kota Singkawang dalam Rencana Kerja Tahun 2021 menetapkan **tujuan** yang ingin dicapai sebagai berikut:

“Meningkatnya kepuasan Anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD”

- **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah:

1. Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD.

Tabel. 3.2.

Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2022

| NO | SASARAN | Indikator Kinerja | Target 100 % | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) |
|----|---|---|--------------|---|---|------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | SEKRETARIAT DPRD | | | |
| 1 | | Presentase Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Presentase Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | |
| | Meningkatnya Penataan kelembagaan Dan Organisasi | Presentase Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Presentase Fasilitasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | |
| | | | 100 % | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 2 dokumen | |
| | | | 100 % | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, LAKIP, LPPD OPD | 3 dokumen | |
| | | | 100 % | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 4 dokumen | |
| | Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun | 100 % | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun | 100% | |
| | | | 100 % | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Anggota DPRD, Jumlah ASN, Jumlah THL | 30 orang, 29 orang, 22 orang | |
| | | | 100 % | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan | 100% | |
| | | | 100 % | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIPKD | Cakupan bahan pelaksanaan verifikasi | 2 laporan, 250 SPM | |
| | | | 100 % | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan | 48 dokumen | |
| | | | 100 % | Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir Tahun, Penyediaan Tanggapan | 1 dokumen | |
| | | | 100 % | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan | 2 dokumen | |
| | | | 100 % | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 6 dokumen | |
| | | Presentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor | 100 % | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | Presentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor | 100% | |
| | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Cakupan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 2 laporan | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|---|---------------------------------------|--|
| | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Presentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas | 100 % | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | Presentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas | 100% | |
| | | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | 140 stel | |
| | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan | 180 orang | |
| | Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD | Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor | 100 % | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Prosentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor | 100% | |
| | | | 100 % | Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 100% | |
| | | | 100 % | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 belanja jasa, 3 item bahan/material | |
| | | | 100 % | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan peralatan rumah tangga yang disediakan | - | |
| | | | 100 % | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 350 jilid, 58.000 copy, 20 item cetak | |
| | | | 100 % | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan | Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 majalah dan iklan, 5 koran | |
| | | | 100 % | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | |
| | Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD | Presentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah | 100 % | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Presentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah | | |
| | | | 100 % | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang diadakan | - | |
| | | | 100 % | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebeleur yang diadakan | - | |
| | | | 100 % | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | |
| | | Prosentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100 % | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Prosentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | |
| | | | 100 % | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 48 rekening | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|--|---|-----------------|--|
| | | | 100 % | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Alat Tulis Kantor Jasa Kebersihan Kantor Makanan dan Minuman yang tersedia | 100% | |
| | | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | |
| | | | 100 % | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional yang disediakan | 6 STNK, 84 kali | |
| | | | 100 % | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan | - | |
| | | | 100 % | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebeleur yang dipelihara | - | |
| | | | 100 % | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Cakupan Rumah Jabatan dan Kantor yang dipelihara | 100% | |
| | | | 100 % | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 126 unit | |
| | Meningkatnya Kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD | Persentase peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 100 % | LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD | Presentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 100% | |
| | | | 100 % | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Dokumen Pelaporan LHKPN melalui e-LHKPN dan SPT Tahun melalui DJP Online Pimpinan dan Anggota DPRD | 60 dokumen | |
| | | | 100 % | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah pakaian dinas beserta atributnya | 120 stel | |
| | | | 100 % | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | General check up yang terlayani bagi Anggota DPRD | 30 orang | |
| | Meningkatnya Kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD | Presentase Terpenuhinya Layanan Adminstrasi DPRD | 100 % | LAYANAN ADMINISTRASI DPRD | Presentase Terpenuhinya Layanan Adminstrasi DPRD | 100% | |
| | | | 100 % | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah rapat alat kelengkapan dewan, rapat paripurna yang terlaksana | 52 dokumen | |
| 2 | | Presentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD | 100 % | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Presentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD | 100% | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---|--|-------------|--|
| | Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD | Presentase Fasilitas Pembentukan Perda dan Peraturan Daerah | 100 % | PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD | Presentase Fasilitas Pembentukan Perda dan Peraturan Daerah | 100% | |
| | | | 100 % | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Propemperda | 1 dokumen | |
| | | | 100 % | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah raperda yang akan ditetapkan menjadi perda/Peraturan DPRD | 8 perda | |
| | | | 100 % | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah perda/peraturan kepala daerah yang dikaji terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru | - | |
| | | | 100 % | Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Naskah dan Raperda | 3 dokumen | |
| | Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD | Presentase Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100 % | PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN | Presentase Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran | 100% | |
| | | | 100 % | Pembahasan KUA dan PPAS | Dokumen KUA dan PPAS | 2 dokumen | |
| | | | 100 % | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Dokumen KUPA dan PPAS | 2 dokumen | |
| | | | 100 % | Pembahasan APBD | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | |
| | | | 100 % | Pembahasan APBD Perubahan | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | |
| | | | 100 % | Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | |
| | Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD | Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100 % | PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 100% | |
| | | | 100 % | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 dokumen LKPJ | 1 dokumen | |
| | Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD | Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 100 % | PENINGKATAN KAPASITAS DPRD | Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD | 100% | |
| | | | 100 % | Bimbingan Teknis DPRD | Jumlah Bimtek/Sosialisasi yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD | 6 kali | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--------------|--|---|-------------|--|
| | | | 100 % | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan yang terlayani | - | |
| | | | 100 % | Penyediaan tenaga ahli fraksi | Jumlah tenaga ahli fraksi | 7 orang | |
| | | | 100 % | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani, Jumlah dialog dengan masyarakat serta pejabat pemerintah yang dilaksanakan DPRD | 10 kali | |
| | | | 100 % | Penyusunan Program Kerja DPRD | Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 dokumen | |
| | Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD | Presentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100 % | PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT | Presentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 100% | |
| | | | 100 % | Pelaksanaan Reses | Jumlah pertemuan antara anggota DPRD dengan konstituennya | 3 kali | |
| | Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD | Presentase Fasilitasi Tugas DPRD | 100 % | FASILITASI TUGAS DPRD | Presentase Fasilitasi Tugas DPRD | 100% | |
| | | | 100 % | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Cakupan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD baik Dalam dan Luar Daerah | 1 tahun | |
| JUMLAH TOTAL | | | | | | | |

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor – faktor Rumusan Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Rekapitulasi program dan kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2022 merupakan upaya-upaya dalam mencapai visi dan misi Pembangunan Kota Singkawang yang ingin diwujudkan pada 2018–2022 yaitu mewujudkan “SINGKAWANG HEBAT 2022”

Sejalan dengan Program prioritas pembangunan tahun 2022 (RKPD) maka Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Singkawang ada 2 Program dan 16 kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023

| Kode | | | | | Usuran/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021 | Target Kinerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|------|----|----|------|----|---|--|---|--|----------------|--------|----------------|----------|
| | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | Lokasi |
| | | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| 4 | 02 | | | | SEKRETARIAT DPRD | | | | 35.187.158.295 | | 35.538.383.169 | |
| 4 | 02 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Prosentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 27.809.701.668 | | 28.087.151.980 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | | PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Presentase Fasilitas Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 46.081.843 | | 46.542.660 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah | 2 dokumen | 100% | 9.261.560 | 100% | 9.354.175 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Data capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, LAKIP, LPPD OPD | 3 dokumen | 100% | 16.820.283 | 100% | 16.988.485 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 4 dokumen | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.200.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | Presentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun | | | 21.019.030.763 | | 21.228.574.670 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Anggota DPRD, Jumlah ASN, Jumlah THL | 30 orang, 29 orang, 22 orang | 100% | 20.664.976.163 | 100% | 20.871.625.924 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Cakupan jasa administrasi keuangan yang disediakan | 100% | 100% | 191.640.000 | 100% | 192.910.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SIPKD | Cakupan bahan pelaksanaan verifikasi | 2 laporan, 250 SPM | 100% | 42.000.000 | 100% | 42.420.000 | Set-DPRD |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|---------------------------------------|------|--------------------|-------|--------------------|----------|
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD | Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan | 48 dokumen | 100% | 31.000.000 | 100 % | 31.310.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun, Penyediaan Tanggapan | 1 dokumen | 100% | 40.000.000 | 100 % | 40.400.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan | 2 dokumen | 100% | 26.916.900 | 100 % | 27.186.069 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran | 6 dokumen | 100% | 22.497.700 | 100 % | 22.722.677 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.03 | | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | Presentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor | | | 50.545.200 | | 51.050.652 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Cakupan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | 2 laporan | 100% | 50.545.200 | 100 % | 51.050.652 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | Presentase aparatur memperoleh fasilitas kelengkapan dinas | | | 126.788.000 | | 128.055.880 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang diadakan | 140 stel | 100% | 46.000.000 | 100 % | 46.460.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah peserta bimtek implementasi peraturan perundang-undangan | 180 orang | 100% | 80.788.000 | 100 % | 81.595.880 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | | ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH | Presentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi kantor | | | 544.559.441 | | 550.004.735 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 100% | 100% | 37.614.313 | 100 % | 37.990.456 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Cakupan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 1 belanja jasa, 3 item bahan/material | 100% | 131.646.600 | 100 % | 132.963.066 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Cakupan peralatan rumah tangga yang disediakan | - | 100% | 67.890.200 | 100 % | 68.568.802 | Set-DPRD |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|---|------|----------------------|-------|----------------------|----------|
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 350 jilid, 58.000 copy, 20 item cetak | 100% | 74.368.328 | 100 % | 75.112.011 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan | Cakupan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan | 1 majalah dan iklan, 5 koran | 100% | 83.040.000 | 100 % | 83.870.400 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - | 100% | 150.000.000 | 100 % | 151.500.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Presentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah | | | 3.625.545.800 | | 3.661.801.258 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang diadakan | - | 100% | 1.200.000.000 | 100 % | 1.212.000.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Mebeleur yang diadakan | - | 100% | 1.394.064.200 | 100 % | 1.408.004.842 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | 100% | 1.031.481.600 | 100 % | 1.041.796.416 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Prosentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | | | 1.650.173.180 | | 1.666.674.911 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 48 rekening | 100% | 330.000.000 | 100 % | 333.300.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Alat Tulis Kantor Jasa Kebersihan Kantor Makanan dan Minuman yang tersedia | 100% | 100% | 1.320.173.180 | 100 % | 1.333.374.911 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 265.678.156 | | 268.334.937 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Cakupan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/operasional yang disediakan | 6 STNK, 84 kali | 100% | 101.830.000 | 100 % | 102.848.300 | Set-DPRD |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|------------|------|----------------------|-------|----------------------|----------|
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan | - | 100% | 50.000.000 | 100 % | 50.500.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebeleur yang dipelihara | - | 100% | 15.000.000 | 100 % | 15.150.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Cakupan Rumah Jabatan dan Kantor yang dipelihara | 100% | 100% | 40.504.000 | 100 % | 40.909.040 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 126 unit | 100% | 58.344.156 | 100 % | 58.927.597 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | | LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD | Presentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | | | 423.000.000 | | 427.230.000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Dokumen Pelaporan LHKPN melalui e-LHKPN dan SPT Tahun melalui DJP Online Pimpinan dan Anggota DPRD | 60 dokumen | 100% | 15.000.000 | 100 % | 15.150.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah pakaian dinas beserta atributnya | 120 stel | 100% | 378.000.000 | 100 % | 381.780.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 01 | 2.15 | 03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | General check up yang terlayani bagi Anggota DPRD | 30 orang | 100% | 30.000.000 | 100 % | 30.300.000 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | | LAYANAN ADMINISTRASI DPRD | Presentase Terpenuhinya Layanan Adminstrasi DPRD | | | 58.299.285 | | 58.882.277 | |
| 4 | 02 | 01 | 2.16 | 03 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah rapat alat kelengkapan dewan, rapat paripurna yang terlaksana | 52 dokumen | 100% | 58.299.285 | 100 % | 58.882.277 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | | | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Presentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD | | | 7.377.456.627 | | 7.451.231.189 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | | PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD | Presentase Fasilitasi Pembentukan Perda dan Peraturan Daerah | | | 1.460.052.831 | | 1.474.653.358 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Propemperda | 1 dokumen | 100% | 85.415.000 | 100 % | 86.269.150 | Set-DPRD |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|--|-----------|------|----------------------|--------------|----------------------|----------|
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah raperda yang akan ditetapkan menjadi perda/Peraturan DPRD | 8 perda | 100% | 1.028.135.973 | 100 % | 1.038.417.332 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah perda/peraturan kepala daerah yang dikaji terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru | - | 100% | 46.501.858 | 100 % | 46.966.876 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Naskah dan Raperda | 3 dokumen | 100% | 300.000.000 | 100 % | 303.000.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | | PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN | Presentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran | | | 1.178.948.198 | | 1.190.737.679 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Pembahasan KUA dan PPAS | Dokumen KUA dan PPAS | 2 dokumen | 100% | 108.160.920 | 100 % | 109.242.529 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Dokumen KUPA dan PPAS | 2 dokumen | 100% | 137.822.122 | 100 % | 139.200.343 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Pembahasan APBD | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | 100% | 137.822.122 | 100 % | 139.200.343 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pembahasan APBD Perubahan | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | 100% | 397.928.722 | 100 % | 401.908.009 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD | Dokumen Perda dan Perwako | 2 dokumen | 100% | 397.214.312 | 100 % | 401.186.455 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | | PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Presentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | | | 309.967.950 | | 313.067.629 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.03 | 08 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 dokumen LKPJ | 1 dokumen | 100% | 309.967.950 | 100 % | 313.067.629 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | | PENINGKATAN KAPASITAS DPRD | Presentase Peningkatan Kapasitas DPRD | | | 1.357.839.470 | 100 % | 1.371.417.864 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 02 | Bimbingan Teknis DPRD | Jumlah Bimtek/Sosialisasi yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD | 6 kali | 100% | 1.121.676.000 | 100 % | 1.132.892.760 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi dewan yang terlayani | - | 100% | 100.000.000 | 100 % | 101.000.000 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 05 | Penyediaan tenaga ahli fraksi | Jumlah tenaga ahli fraksi | 7 orang | 100% | 94.500.000 | 100 % | 95.445.000 | Set-DPRD |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----|--|---|-----------|------|-----------------------|-------|-----------------------|----------|
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 06 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah pengaduan masyarakat yang terlayani, Jumlah dialog dengan masyarakat serta pejabat pemerintah yang dilaksanakan DPRD | 10 kali | 100% | 28.821.230 | 100 % | 29.109.442 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.04 | 07 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Dokumen Rencana Kerja DPRD | 1 dokumen | 100% | 12.842.240 | 100 % | 12.970.662 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | | PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT | Presentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | | 718.793.178 | | 725.981.109 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.05 | 03 | Pelaksanaan Reses | Jumlah pertemuan antara anggota DPRD dengan konstituennya | 3 kali | 100% | 718.793.178 | 100 % | 725.981.109 | Set-DPRD |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | | FASILITASI TUGAS DPRD | Presentase Fasilitasi Tugas DPRD | | | 2.351.855.000 | | 2.375.373.550 | |
| 4 | 02 | 02 | 2.08 | 01 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Cakupan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD baik Dalam dan Luar Daerah | 1 tahun | 100% | 2.351.855.000 | 100 % | 2.375.373.550 | Set-DPRD |
| TOTAL | | | | | | | | | 35.187.158.295 | | 35.538.383.169 | |

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2022 ini merupakan Revisi Rencana Kerja Tahunan berdasarkan Penjelasan Indikator Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2020 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dan anggaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Singkawang Tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2022 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kota Singkawang maupun dengan Instansi terkait lainnya.

Singkawang, Juni 2021
Sekretaris DPRD Kota Singkawang

KARIM, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19641103 198510 1 001